

**DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN
(Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Studi Ilmu Hukum



Oleh :

WARTOYO
NIM : R 10080038

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

TESIS BERJUDUL
DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN
(Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

WARTOYO

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 04 Bulan Juli Tahun 2011
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

Pembimbing I/Ketua

Anggota

Prof,Dr Harun,SH,M Hum Prof

Dr.Nurhadiantomo

Pembimbing II/Anggota

Prof.Dr.Absori, S.H,M.Hum

Surakarta , 04 Juli 2011

Direktur,

Prof,Dr Khudzaifah Dimiyati, SH,M Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “ **Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Dalam Perspektif Kemandirian (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**” ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian , sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Surakarta, 04 Juli 2011

W a r t o y o

NIM : R 100080038

KATA PENGANTAR

Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pedesaan. Sistem pemerintahan desa telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan era reformasi saat ini, dalam pemberdayaan desa diperlukan eksistensi peranan hukum yakni mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa.

Penulisan Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan terselesaikannya Tesis ini maka kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam melakukan penelitian, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof, Dr.Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Prof,Dr Khudzaifah Dimiyati, SH,M Hum, selaku Direktur Pascasarjana
3. Prof,Dr Harun,SH,M Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran maupun petunjuk dalam penulisan Tesis ini
4. Prof,Dr Absori,SH,M Hum, selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan agar tesis ini dapat selesai dengan baik.
5. Para dosen, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

6. Camat Gatak, Kabupaten Sukoharjo
7. Kepala Desa se-Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo
8. Istri, dan Anak-anak kami tercinta yang selalu memberikan Do`a, dorongan dan semangat serta cintanya yang tulus demi suksesnya penyusunan Tesis ini
9. Kakak serta saudara yang senantiasa yang selalu memberikan motifasi
10. Pengurus Yayasan dan Para Dosen Akademi Pariwisata Mandala **Hakti Surakarta**
11. Rekan-rekan sejawat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu , atas semua bantuan dan dorongan moril dan spirituil sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini guna memperoleh gelar magister ilmu hukum.

Dengan penuh kerendahan hati penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah diberikan sejak penelitian ini dimulai sampai penulisan laporan ini selesai mendapat suatu manfaat .

Surakarta ,04 Juli 2011

Penulis

ABSTRAK

Wartoyo, Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Perspektif Kemandirian (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo). Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Pascasarjana 2011.

Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. Sistem pemerintahan desa telah dikenal sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi. Dalam upaya pemberdayaan desa yang meliputi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diperlukan eksistensi peranan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa telah banyak dikeluarkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa, namun yang menjadi permasalahan mengimplementasikan peraturan desa yang sekaligus cenderung dipengaruhi oleh kultur masyarakat adapt.

Metode penelitian yang dipakai metode diskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative untuk mengetahui eksistensi peraturan hukum dalam pemberdayaan pemerintahan desa . Penelitian ini mengambil 14 lokasi (empat belas) desa di kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang tidak memspesifikasi sampel pada desa tertentu untuk dapat melihat fenomena dan karakteristik masing-masing desa secara utuh.

Substansi peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa (Peraturan Daerah dan Peraturan Desa) tidak mampu menampung permasalahan yang berkembang di desa. Kondisi ini diperburuk dengan iklim hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah (Kabupaten) yang buruk. Hal tersebut berkaitan dengan tarik ulur kewenangan, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah yang berada di desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Jati dipilih sebagai Profil Desa Mandiri di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Pelaksanaan Desa Mandiri berpedoman pada Perda Nomor 4 Tahun 2006, Perda Nomor 16 Tahun 2006, dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006. Model Desa sebagai masyarakat hukum yang ideal mencakup aspek kelembagaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat , konsep pembangunan desa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

ABSTRACT

Wartoyo, Rural of union law society in existence of rural (problem law study of Jati Village Gatak District Regional Sukoharjo) Thesis, Master Program of education law, Muhammadiyah University of Surakarta Post Graduate work Program 2011.

Development of rural governments in Indonesia has a strategic significantly value related to the growth of community. Rural Government system has been well-known since the colonial until reformation era. In an effort of rural empowerment involving all governmental and society elements, the existence of statutory rules is very required . The Laws governing rural governments have been variously issued ranging from The Laws, government Rules and Regional Rules until rural laws, however the main case is the lack of rural potency , (human and natural resources) and the lack of rural apparatus who can implement rural rules that simultaneously lead to be influenced by traditional culture of society.

The method used was descriptive analysis using a normative judicial approach to know the existence of laws in empowering rural governments. The study took locations at 14 rural (from) regencies of Sukoharjo that no specified the certain rural samples to find the phenomenon and characteristic of each rural completely.

Substance of the laws governing the rural governments (regional and rural laws) could not accommodate the problems being developed in rural . Such a condition was worst by the climate of inadequate relationship between rural government and regional (regional) government it was associated with cohesion and adhesion of authority, especially for regional income resources at rural level.

Based on the result of the research can be summarized that Jati village is chosen by the autonomous village profile in Gatak district, Sukoharjo regency. The implementation of the autonomous village is oriented on Perda No 4 in 2006, Perda No 16 in 2006, and Regent's role No 21 in 2006. Type of village as an ideal law society, including in village administration institution aspect, society

utilize, the implementation of law, society tenacity, village development concept, and the factors that influence it.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

1. Jenis dan startegi Penelitian	13
2. Lokasi Penelitian	14
3. Subyek Penelitian	14
4. Metode pengumpulan Data	15
5. Tehnik Analisis Data	16
6. Tahap-tahap pelaksanaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Desa Dalam Konsep Normatif	21
B. Tinjauan Tentang Desa	25
C. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum	30
D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Otonomi Desa	36
E. Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Otonomi Desa	38
F. Hukum dan Kebijakan Publik	49
G. Partisipasi Masyarakat	55
H. Teori Bekerjanya Hukum	58
BAB III DISKRIPSI DESA JATI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO	
A. Letak Geografis	59
1. Luas Wilayah	59

2. Batas Wilayah	60
3. Sumber Daya Alam	60
4. Pendidikan	61
5. Kesehatan	61
6. Ekonomi Masyarakat	61
7. Kelompok Gotong Royong	62
8. Partisipasi Masyarakat	62
9. Pemerintahan	62
10. Lembaga Kemasyarakatan	62
11. Struktur Organisasi Desa Jati	63
B. Alasan Pemilihan Desa Jati Sebagai Profil Desa Mandiri	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	66
1. Profil Desa Mandiri	66
2. Pelaksanaan Desa Mandiri di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	69
3. Model Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang Ideal	74
B. Pembahasan Hasil Penelitian	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 109

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.	Struktur Organisasi Desa Jati	63
----	-------------------------------	----